

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abror, Khoirul. (2020). *Hukum Perkawinan dan Perceraian Cetakan Kedua*. Yogyakarta: Penerbit Ladang Kata.
- Cahyani, Tinuk Dwi. (2020). *Hukum Perkawinan*. Malang: UMM Press.
- Farida, Maria. (1998). *Ilmu Perundang-undangan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Hasan, M. Iqbal. (2002). *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ibrahim, Nana Sudjana. (1984). *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*. Bandung: Sinar Baru.
- M. Hadjon, Phillipus. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Marzuki. (1991). *Metode Riset*. Yogyakarta: BPFE-UII.
- Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rachman, Anwar, et al. (2020). *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Rahardjo, Satjipto. (1986). *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.
- _____. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- _____. (2010). *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Ridwan. (2014). *Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Saebani, Beni Ahmad. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.

Sumardjono, Maria SW. (2021). *Bahan Kuliah (Metode Penelitian Ilmu Hukum) Edisi Revisi*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Suprayogo, Imam dan Tobroni. (2003). *Metodologi Penelitian Sosial-Agama Cetakan 2*. Bandung: Remaja Rosada Karya.

Usman, Husaini. (2003). *Metodelogi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.

Witanto, D. Y. (2012). *Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*. Jakarta: Prestasi Publisher.

Zamroni, Muhammad. (2018). *Prinsip-prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316).

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674).

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077).

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050).

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184).

Karya Ilmiah

Adonara, Firman Floranta. (2015). "Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 2.

Al-Fatih, Sholahuddin dan Mujibur Rahman Khairul Muluk. (2023). "Understanding Beschikking, Regeling and Beleidsregel in Indonesian Legal System". *Audito Comparative Law Journal*, Vol. 4, Issue 2, <https://doi.org/10.22219/aclj.v4i2.25417>.

Al-Fasil, Maulana Ridho, et al. (2023). "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Perspektif Akademisi: Kekuatan Hukum, Ketetapan Dan Konsistensi, Pengaruh Terhadap Putusan". *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 2, <https://doi.org/10.46773/usrah.v4i2.791>.

Alghifari, Abuzar. (2024). "Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 dalam Perspektif Hermeneutika Al-Qur'an Tentang Perkawinan Beda Agama (Analisis Teori Double Movement Terhadap QS. Al-Baqarah [2]: 221)". *El-Izdiwaj: Indonesia Journal of Civil and Islamic Family Law*, Vol. 5, No. 2.

Amaliasari, Rosida, et al. (2018). "Kedudukan Hukum Akta Kelahiran Anak Di Luar Kawin yang Dicantumkan Nama Ayah". *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 21, No. 2.

Amisah dan Mia Hadiati. (2024), "Analisis Larangan Pencatatan Perkawinan Beda Agama dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2023: Sebuah Tinjauan dari Perspektif Hak Asasi Manusia". *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 3, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>.

- Anwar, Khoirul. (2022). "Penerapan Asas Ius Curia Novit Oleh Hakim Pengadilan Agama di Nusa Tenggara Timur". *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 4, No. 5.
- Ariyulinda, Nita. (2014). "Pengaturan Perkawinan Seagama Dan Hak Konstitusi WNI". *Jurnal Rechtsvinding*.
- Ashbuli, Muhammad. (2015). "Undang-undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama (Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama)". *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 3, No. 2, <https://dx.doi.org/10.15408/jch.v2i2.2319>.
- Asnawi, Habib Shulton. (2016). "Politik Hukum Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah: Upaya Membongkar Positivisme Hukum Menuju Perlindungan HAM". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10, No. 2.
- Bakri, Zulkifli. (2012). "Diskursus Independensi Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia" *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15, No. 1, <https://doi.org/10.25299/konstitusi.2021.v15i1.9458>.
- Bijaksana, Arif. (2024). "Perlindungan Hukum Hak Waris Istri Kedua dari Perkawinan Tidak Tercatat Dikaitkan dengan Fungsi Pencatatan Perkawinan". *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, Vol. 1, No. 2, hlm. 247. <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v1i2.492>.
- Denaya, Shafa dan Murti Pramawardani Dewi. "Tinjauan Yuridis Mengenai SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama Dan kepercayaan". *Viva Justicia: Journal of Private Law*, Vol. 1, No. 1.
- Dewi, Erna. (2010). "Peranan Hakim Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia". *Pranata Hukum*, Vol. 5, No. 2.
- Duryadi, Martinus. (2017). "Dinamika Hubungan Antar Agama Dan Masyarakat". *Jurnal Abdiel*, Vol. 1, No. 1, <https://doi.org/10.37368/ja.v1i01.86>.
- Dyah, Sevia Ayu dan Adi Suliantoro. (2024). "Pelindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak dalam Kasus Perceraian di Kota Semarang". *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 5, No. 10.
- Faizal, Liky. (2016). "Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan". *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 8, No. 2, <http://dx.doi.org/10.24042/asas.v8i2.1247>.

- Fauzi, Muhammad Latif. (2023). "Administrative Transgression And Judicial Discretion For The Sake Of Citizens Rights (The Legalisation of Unregistered Marriages in Indonesia)". *Al-Ahwal*, Vol. 16, No. 2, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2023.16202>.
- Fitri, Winda, dkk. (2024) "Permasalahan Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia: Studi Komparatif." *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, Vol. 14, No. 1, <https://doi.org/10.30999/mjn.v14i1.2938>.
- Gamatri, Gusti Ayu Ade Diah, dkk. (2023). "Kedudukan Hukum Anak Yang Dilahirkan Diluar Perkawinan Sah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 4, No. 3. <https://10.0.217.85/jkh.4.3.8041.281-286>.
- Gonadi, Aurora Vania Crisdi dan Gunawan Djajaputra. (2023). "Analisis Perspektif Pro Kontra Masyarakat Terhadap Sema No. 2 Tahun 2023". *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 1, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>.
- Hakim, Muh. Ridha. (2018). "Tafsir Independensi Kekuasaan Kehakiman Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi" *Jurnal Hukum Peradilan*, Vol. 7, No. 2, <http://dx.doi.org/10.25216/jhp.7.2.2018.279-296>.
- Hidayat, Arif. (2013). "Penemuan Hukum Melalui Penafsiran Hakim dalam Putusan Pengadilan". *Pandecta*, Vol. 8, No. 2.
- Hermanto, Yunike Rahma. (2024). "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif, Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia di Indonesia". *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, Volume 12 Number 1, <https://doi.org/10.20961/jolsic.v12i1.85113>.
- Hertoni, Macsellino. (2016). "Independensi Hakim dalam Mencari Kebenaran Materil". *Lex Crimen*, Vol. 5, No. 1.
- Islam, Andi Badrul, dkk. (2024). "Implikasi Yuridis Perkawinan Beda Agama Pasca Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan". *Unizar Recht Journal*, Vol. 3, No. 4.
- Iwan. (2022) "Akta Nikah Sebagai Bukti Otentik Perkawinan di Indonesia: Analisis Maqashid Syariah Terhadap Pencatatan Perkawinan." *Al-Ushrah: Jurnal Al-ahwal As-Syakhsiyah*, Vol 10, No. 1.
- Kasudarman, Mesu Reh. (2024). "Analisis Ratio Decidendi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gresik (No. 4/Pdt.G/2022/PN. Gsk) Dalam Perkara

Perbuatan Melawan Hukum". *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 4, No. 5.

Kurniawan, M. Beni, et al. (2023). "Disparitas Putusan Pengadilan Terkait Legalisasi Nikah Beda Agama". *Jurnal Yudisial*, Vol. 16, No. 3, [https://DOI: 10.29123/jy/v16i3.660](https://doi.org/10.29123/jy/v16i3.660).

Mariyadi. (2014). "Hubungan Kemandirian Peradilan dengan Keyakinan Hakim Mahkamah Konstitusi untuk Penegakkan Keadilan". *Yustisia*, Vol. 3, No. 1. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i1.10104>.

Missleini dan Evi Retno Wulan. (2024). "Asas Keadilan Ratio Decidendi Hakim dalam Putusan Nomor 813K/PID/2023". *Jurnal Hukum Sehasen*, Vol. 10, No. 1.

Mubit, Rizal. (2016). "Peran Agama Dalam Multikulturalisme Masyarakat Indonesia". *Episteme*, Vol. 11, No. 1, <https://doi.org/10.21274/epis.2016.11.1.163-184>.

Mursalin, Ayub. (2023). "Legalitas Perkawinan Beda Agama: Mengungkap Disparitas Putusan Pengadilan di Indonesia". *Jurnal Hukum*, Vol. 6, No. 1, <https://10.22437/ujh.6.1.113-150>.

Musyafah, Aisyah Ayu. (2020). "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofi Hukum Islam", *Jurnal Crepido*, Vol. 01, No. 02, <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>.

Nadia, Laila, dan Sumriyah. (2024). "Akibat Hukum Perkawinan Tidak Tercatat Terhadap Legalitas Anak di Dusun Tanjung Desa Taman Jrengik Sampang." *Jurnal Hukum Perdata dan Pidana*, Vol. 1, No. 4, <https://doi.org/10.62383/referendum.v1i4.285>.

Nadir. (2024). "Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Mengembangkan Keturunan Yang Sah". *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, Vol. 7, No. 1, <https://doi.org/10.47647/jsh.v7i1.2220>.

Nuraini, Sifa Mulya. (2021). "Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam dan Hadits Ahkam)." *Al Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies*, Vol. 3, No. 1.

Nurwandri, Andri, et al. (2023). "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Independensi Hakim Di Pengadilan". *Jurnal of Education Research Humaniora*, Vol. 1, No. 4, <https://doi.org/10.51178/jerh.v1i4.1634>.

- Palandi, Anggreini Carolina. (2013). "Analisa Yuridis Perkawinan Beda Agama Di Indonesia". *Lex Privatum*, Vol. 1, No. 2.
- Pratisiya, Venny, dkk. (2023). "Perubahan Konstruksi Sosial Dalam Pembagian Kerja Domestik: Studi Hubungan Antara Suami Istri Keluarga Modern." *Yinyang Journal*, Vol. 18, No. 2, <https://doi.org/10.24090/yinyang.v18i2.8573>.
- Purnomo, Girianto Edy dan Anang Dony Irawan. (2024). "Kedudukan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Terhadap Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara". *Media of Law and Sharia*, Vol. 5, No. 3. <https://doi.org/10.18196/mls.v5i3.111>.
- Rachmandika, Anisa Dwi, et al. (2024). "Kemandirian Kekuasaan Kehakiman Dalam Menegakkan Hukum Yang Demokratis", *Hangoluan Law Review*, Vol. 3, No. 1, <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.11592>.
- Rato, Antonius Aldo dan Marsya Duni Puteri. (2024). "Analisis Yuridis SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Hakim Dalam Perkara Pencatatan Perkawinan Antar Agama Menurut UU HAM Nomor 39 Tahun 1999". *Future Academia*, Vol. 2, No. 4, <https://doi.org/10.61579/future.v2i4.242>.
- Rusmanto, Ayub, dkk. (2024). "Perkawinan Beda Agama di Tengah-Tengah Masyarakat Plural Berdasarkan Kajian Teks 1 Korintus 7:12-16". *Veritas Lux Mea* Vol. 6, No. 1, <https://doi.org/10.59177/veritas.v6i1.265>.
- Rohmadi dan Muhammad Farijal Akmal. (2022). "Korelasi Agama dan Masyarakat Dalam Menyikapi Budaya Lokal di Desa Sungai Duren". *Jurnal Inovasi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Vol. 2 No. 2, <https://doi.org/10.53621/jippmas.v2i2.154>.
- Santoso, Raihan Andhika, et al. (2023). "Kedudukan dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif Indonesia". *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 4 <https://doi.org/10.59581/deposisi.v1i3.1385>.
- Sekarbuana, Made Widya, et al. (2021). "Perkawinan Beda Seagama Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia". *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 2, No. 1, <https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3044.16-21>.
- Setiawan, Bayu. (2018). "Penerapan Hukum Progresif Oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan Substantif Transedensi". *Jurnal Kosmik Hukum*, Vol. 19, No. 1, <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v18i1.2338>.

- Shaleh, Ali Islaem, et al. "Hubungan Agama Dan Negara Menurut Pancasila Dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 2, <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i2.237-249>.
- Shobirin. (2018). "Penemuan Hukum Oleh Hakim Mahkamah Agung". *Yudisia*, Vol. 9, No. 1.
- Shofwan, Arif Muzayin dan Moch Lukluil Maknun. (2023). "Urgensi Pluralisme Menurut Enam Agama Resmi di Indonesia". *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqiqah dan Studi Keagamaan*, Vol. 11, No. 2, <https://doi.org/10.21043/fikrah.v8i1.19370>.
- Suherman, Andi. (2019). "Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman", *SIGN Jurnal*, Vol. 1, No. 1, <https://doi.org/10.37276/sjh.v1i1.29>.
- Sunu, I Gusti Ayu Pradnyahari Oka. (2021). "Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Kertha Wicara*, Vol. 10, No. 6, <https://doi.org/10.24843/KW.2021.v10.i06.p01>.
- Suryoutomo, Markus dan Mahmuda Pancawisma Febriharini. (2020). "Penemuan Hukum (Rechtvinding) Hakim Dalam Perkara Perdata Sebagai Aspek Mengisi Kekosongan Hukum. *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 18, No. 1.
- Tagel, Dewa Putu. (2019). "Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil". *Vyavahara Duta*, Vol. XIV, No. 2.
- Utami, Defani Putri. (2023). "Perkawinan Campuran Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif". *Masadir Jurnal*, Vol. 1, No. 2, <https://doi.org/10.33754/masadir.v1i2.372>.
- Wahyuni, Ervina Fitri dan Hufron. (2023). "Legalitas Penerbitan Akta Kelahiran Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan". *Journal Evidence of Law*, Vol. 2, No. 3, <https://doi.org/10.59066/jel.v2i3.382>.
- Wahyuni, Sri. (2011). "Kontroversi Perkawinan Beda Agama Di Indonesia". *Al-Risalah*, Vol. 11, No. 2, <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v11i02.466>.
- Winarni, Tri, dkk. (2023). "Pencatatan Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Weru)". *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 8, No. 2.

- Yanova, Muhammad Hendri, et al. (2023). "Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris". *Badamai Law Journal*, Vol. 8, No. 2, <http://dx.doi.org/10.32801/damai.v8i2.17423>.
- Yudesman. (2013). "Kebebasan Bergama (Sebuah Analisis Perundang-undangan Indonesia, Hukum dan Hukum Islam)", *Jurnal Islamika*, Vol. 13, No. 1.
- Zahra, Adinda Thalia. (2023). "Problematika Independensi Hakim Sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman", *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 3 No. 2, <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i2.303>.
- Zubaidah, Dwi Arini. (2019). "Pencatatan Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum dalam Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah". *Al-Ahwal*, Vol. 12, No. 1.

Skripsi/ Tesis

- Hamdi, Mahfuzh. (2024). *Problematika Munculnya Sema Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penolakan Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Dari Perspektif Kepastian Hukum*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Lestari, Rustya Puji. (2024). *Analisis Yuridis Terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan (Studi Sinkronisasi Hukum)*. Surabaya: UIN Sunan Ampel.
- Ramadhani, M. Iqbaluddin. (2024). *Analisis Yuridis SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar Umat Yang Berbeda Agama Dan Keyakinan Ditinjau Dari Perspektif UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM*. Kediri: IAIN Kediri.

Internet

- Wahyudi, Muhamad Isna. "Sistem Kamar, SEMA, dan Visi Kesatuan Hukum Yang Patut Dipertanyakan." *Hukum Online*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/sistem-kamar--sema--dan-visi-kesatuan-hukum-yang-patut-dipertanyakan-lt64eea4e8d8786?page=1>, (diakses pada 6 Juni 2024, pukul 19.33 WIB)
- Yasin, Muhammad. "Konsep dan Elemen-elemen Perlindungan Hukum." *Hukum Online*,

<https://www.hukumonline.com/stories/article/lt64b79afb5a786/konsep-dan-elemen-elemen-perlindungan-hukum>, (diakses pada 1 Mei 2025, pukul 14.00 WIB)

Komnas Perempuan, “Keberadaan SEMA 2/2023 Berdampak Pada Tidak Terpenuhinya Pelindungan Hukum Bagi Warga Negara Yang Melangsungkan Perkawinan Pasangan Berbeda Agama, Berpotensi Diskriminasi Dan Berimbas Kepada Aspek Administratif Yang Pada Gilirannya Mempengaruhi Hak Dan Kewajiban”, *<https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-perempuan-merespon-surat-edaran-mahkamah-agung-nomor-2-tahun-2023-tentang-petunjuk-bagi-hakim-dalam-mengadili-perkara-permohonan-pencatatan-perkawinan-antar-umat-yang-berbeda-agama-dan-kepercayaan>*, (diakses pada 23 Juli 2025, pukul 12.33 WIB)

Andi Saputra, “SETARA Minta MA Cabut SE Larangan Hakim Izinkan Hakim Nikah Beda Agama”, *<https://news.detik.com/berita/d-6832184/setara-minta-ma-cabut-se-larangan-hakim-izinkan-nikah-beda-agama>*, (diakses pada 23 Juli 2025, pukul 12.45 WIB)

Putusan

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. “Ikhtisar Putusan Perkara Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Kedudukan Anak di Luar Perkawinan”.